

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA DAN ETIK
TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA
(Studi Penelitian Pada Divisi Profesi dan Pengamanan
Kepolisian Resor Kota Deli Serdang)**

Leo Pebrimanta *
Dr. Ibnu Affan S.H.M.Hum **
Dr. Cut Nurita, SH.MH **

ABSTRAK

Oknum polisi yang melakukan tindak pidana berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana, bagaimana penerapan sanksi terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana, bagaimana hambatan dalam penegakan sanksi terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana dan upaya mengatasinya

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Resor Kota Deli Serdang. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Penindakan Propam terhadap Polisi yang melakukan tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mekanisme penanganannya melalui sidang Komisi Kode Etik Polri. Tindakan oleh Propam terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP dengan mengingat, memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang mengatur secara khusus bagi tersangka anggota Polri dan jika terbukti, maka akan dikenakan sanksi penurunan pangkat dan apabila sudah tidak layak, seorang anggota Polri akan diberhentikan secara hormat ataupun tidak hormat.

Hasil penelitian bahwa hambatan dalam penegakan sanksi terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana adalah tidak hadirnya terduga pelanggar, lamanya proses persidangan di Pengadilan Negeri, tidak adanya bidang pertanggungjawaban profesi di tingkat Polres, tidak hadirnya saksi dalam pelaksanaan sidang KKEP.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Etik, Anggota Polisi.

*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

***Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**LEGAL ANALYSIS OF THE IMPOSITION OF CRIMINAL AND ETHICAL
SANCTIONS TOWARDS POLICE MEMBERS WHO COMMIT CRIMES
(Research Study on the Professional and Security
Division of the Deli Serdang City Police Department)**

Leo Pebrimanta *
Dr. Ibnu Affan S.H.M.Hum **
Dr. Cut Nurita, SH.MH **

*

ABSTRACT

Police officers who commit crimes have violated disciplinary rules and the code of ethics because every member of the Indonesian National Police is obliged to uphold the law and maintain the honor, reputation, and dignity of the Indonesian National Police. The formulation of the problem in this study is how the legal regulations apply to police officers involved in crimes, how sanctions are applied to police officers involved in crimes, what are the obstacles in enforcing sanctions against police officers involved in crimes and efforts to overcome them.

This research is a descriptive analytical study that leads to empirical legal research. The data sources in this study are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from research at the Deli Serdang City Police Resort. Data collection tools are library research and field research.

Propam action against police officers who commit crimes is regulated in Government Regulation Number 1 of 2003 concerning Dismissal of Police Members and Regulation of the Indonesian National Police Number 7 of 2022 concerning the Code of Professional Ethics and the Indonesian National Police Code of Ethics Commission, the handling mechanism of which is through the hearing of the Indonesian National Police Code of Ethics Commission. Actions by Propam against Polri members who commit crimes are basically carried out in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code by remembering, paying attention to and referring to the provisions that specifically regulate suspected Polri members and if proven, they will be subject to sanctions in the form of demotion and if they are no longer worthy, a Polri member will be dismissed honorably or dishonorably.

The results of the study show that obstacles in enforcing sanctions against Polri members involved in criminal acts are the absence of the alleged violators, the length of the trial process at the District Court, the absence of a professional accountability field at the Polres level, and the absence of witnesses in the implementation of the KKEP trial.

Keywords: Criminal Sanctions, Ethics, Police Officers.

**Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*

***Supervisor I of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*

****Supervisor II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*